

PENGAWASAN PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN
(Studi tentang Efektivitas Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Cianjur)¹

SUPERVISION OF THE ENVIRONMENTAL SANITATION PROGRAM
(Study of the Effectiveness of Drinking Water Supply Systems at the Cianjur Regency
Spatial Planning and Settlement Office)

Budi Kurniadi

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
kurnia170765@gmail.com

ABSTRAK

Program Sanitasi Lingkungan melalui Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Cianjur belum efektif dan diasumsikan lemahnya pengawasan dari Dinas terkait. Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas Program Sanitasi Lingkungan Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan Metode eksplanasi (*Explanatory Research*). Adapun teknik pengumpulan data: studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi angket, wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan “*Simple Random Sampling*” (Sampel Secara Acak). Unsur populasi dalam penelitian adalah aparat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur. Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien *Rank Spearman*, Uji signifikan dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Program Sanitasi Lingkungan melalui program sistem penyediaan air minum di Kabupaten Cianjur. Ini menunjukkan, bahwa Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memberikan variasi sebesar 55,35% terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur, sedangkan 44,65 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan uji t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,976 dan nilai t_{hitung} sebesar 13,268 lebih besar daripada nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,976. Dengan demikian Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur secara keseluruhan berada pada kriteria “cukup”. Berdasarkan hasil uji statistik yang memperlihatkan korelasi antara variabel X terhadap Y kuat dan searah.

Kata kunci: Pengawasan dan Sanitasi Lingkungan

ABSTRACT

The Environmental Sanitation Program through the Drinking Water Supply System in Cianjur Regency has not been effective and it is assumed that there is a lack of supervision from the relevant Dinas. The research method used Explanatory Research (Explanatory Research). The data collection techniques: literature study and field studies which include questionnaires, interviews and observations. The sampling technique uses "Simple Random

¹ Judul Penelitian Mandiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung, 2019

Sampling". The population element in the study was the Cianjur Regency Spatial Planning and Settlement officers. Data analysis techniques and hypothesis testing using the Spearman Rank Coefficient, Significant Test and Determination Coefficient. The results showed that supervision had a positive and significant effect on the effectiveness of the Environmental Sanitation Program through the drinking water supply system program in Cianjur Regency. This shows that the Supervision of the Spatial Planning and Settlement Office provided a variation of 55.35% on the Effectiveness of the Environmental Sanitation Program in Cianjur Regency, while 44.65% was influenced by other factors not examined. The results of these calculations are compared with the t test with an error rate of 0.05, the t-table is 1.976 and the t-value of 13.268 is greater than the t-table value of 1.976. Thus the Environmental Sanitation Program in Cianjur Regency as a whole is in the "sufficient" criteria. Based on the results of statistical tests that show the correlation between variables X to Y strong and unidirectional.

Keywords: *Environmental Monitoring and Sanitation*

1. Pendahuluan

Progresivitas pembangunan yang disertai dengan pesatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk, maka berbagai fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang sangat urgen. Salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi diantaranya kebutuhan air bersih yang dapat diminum. Persoalan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan melahirkan berbagai dampak dan diantaranya adalah tingginya tingkat pencemaran air, sehingga mengakibatkan terbatasnya ketersediaan air bersih sebagai salah satu faktor yang menunjang terhadap upaya mewujudkan kesehatan masyarakat.

Berbagai peraturan yang mengatur mengenai urgensi sumber daya air,² sebagai sumber kehidupan makhluk hidup terutama untuk manusia di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic human need*) sebagai kebutuhan primer yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari seperti minum, masak, mandi, sehingga fungsi air bersih itu merupakan salah satu fungsi sosial.

Perhatian pemerintah terhadap berbagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, di dalam konteks pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan dalam batas kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mutlak perlu dan pada konteks penyediaan air bersih bagi masyarakat.³

Salah satu program yang memiliki tujuan untuk pemnyediaan air minum yang tidak dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum adalah Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dilaksanakan di tiap Kabupaten/Kota yang pengurusannya menjadi bagian kewenangan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Mengenai program ini, di Kabupaten Cianjur dalam hal Penyediaan SPAM tersebut diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat yang diawasi oleh Dinas dengan standar operating prosedur yang jelas untuk mencapai tujuan. Penyediaan kualitas air bersih dengan syarat-syarat utama di dalam pendistribusiannya.

²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa: "Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif".

³Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum yang mengatur pula mengenai pelayanan bidang sanitasi lingkungan, dan Pemerintah berkewajiban memfasilitasi berbagai program diantaranya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan berbagai lingkupnya termasuk pada BUMN, BUMD dan masyarakat luas.

Masalah yang menarik di dalam penelitian ini khususnya yang terjadi di Kabupaten Cianjur adalah kurang efektifnya Program Sanitasi Lingkungan khususnya pada penyediaan air minum melalui program SPAM, sementara program tersebut telah berlangsung cukup lama tetapi masyarakat di dua desa tersebut sampai saat dilakukan pengamatan masih belum menikmati distribusi air bersih sesuai tujuan program ini. Kondisi umum yang terjadi pada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti masih

terdapat berbagai keluhan khususnya mengenai ketersediaan air bersih dengan distribusi yang sangat terbatas termasuk mengenai kualitas air sehat dan kontinuitas dalam penyediaan air bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat.

Data pendukung terhadap masalah kurang efektifnya Penyediaan Air Minum melalui program SPAM di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Penyediaan Air Minum Melalui SPAM Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2018

Tahun	Target Desa Terlayani	Realisasi	Persentase (%)	Target Jumlah Penduduk	Realisasi Penduduk Terlayani	Persentase (%)
2016	160	90	36,06%	605.500 jiwa	102.600 jiwa	12%
2017	207	110	30,05%	705.500 jiwa	106.600 jiwa	14%
2018	305	116	38,03%	823.500 jiwa	156.600 jiwa	19%

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 2019

Tabel di atas, menunjukkan bahwa Program sanitasi lingkungan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman belum efektif, dan hal itu dapat dilihat dari realisasi tahun 2016 bahwa desa yang harus terlayani hanya mencapai 36,06 %, dengan jumlah penduduk yang semestinya bisa menikmati Pelayanan air bersih tersebut ternyata realisasinya hanya mencapai 12 %. Pada tahun 2017 desa yang harus terlayani hanya mencapai 30,05%, terrealisasi sebesar 14%. Pada tahun 2018 desa yang terlayani hanya mencapai 38,03%, dengan jumlah penduduk yang semestinya bisa menikmati layanan air bersih, realisasinya hanya mencapai 19%.

Indikasi lain yang berkaitan dengan masalah ini di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat masih belum memahami prosedur Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Belum memadainya SDM yang handal dalam Penyediaan Air Minum (SPAM).
3. Belum dipahami oleh sebagian masyarakat aspek pemeliharaan SPAM. di tambahkan belum adanya pemahaman masyarakat terhadap kegunaan air bersih.
4. Aspek sarana penunjang (listrik) dari Pemerintah sering terjadi gangguan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, di dalam penelitian ini dideskripsikan dan dianalisis melalui uji teori pengawasan sebagai salah satu variabel dementara dapat mempengaruhi timbulnya masalah tersebut, karena Dinas Tata Ruang dan Permukiman memiliki kewenangan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan untuk menghindarkan berbagai penyimpangan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh pengawasan terhadap efektivitas Program Sanitasi Lingkungan yang difokuskan pada pelaksanaan program sistem penyediaan air minum di Kabupaten Cianjur.

3. Tinjauan Pustaka

Pengawasan merupakan fungsi yang berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu pekerjaan. Bersama-sama dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, pengawasan membantu semua tingkatan dalam manajemen untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan dengan instruksi yang telah di gariskan dan bertujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah untuk tidak terulang kembali.⁴

Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses usaha atau kegiatan dalam mengamati kegiatan suatu organisasi atau suatu usaha kerja sama yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain salah satu tujuan pengawasan adalah efektivitas dari pekerjaan tersebut dapat tercapai. Dalam perspektif lain dikatakan bahwa pengawasan itu sangat penting karena pengawasan ialah proses pengamat dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya hasil semua pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

⁴Fayol dalam Sujanto, 1996. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 90.

sebelumnya.⁵ Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer/pimpinan.

Manajer/pimpinan memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan. Untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalulaporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara mengombinasikan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung oleh manajer.⁶

Dengan menetapkan syarat-syarat pengawasan sebagai landasan teoritis dalam penelitian, diharapkan dapat terjadi pembagian tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing

⁵Siagian, Sondang, 1995. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Bandung: Alumni, halaman 135

⁶Hasibuan, Malayu S.P., 2001. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 245

berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya.

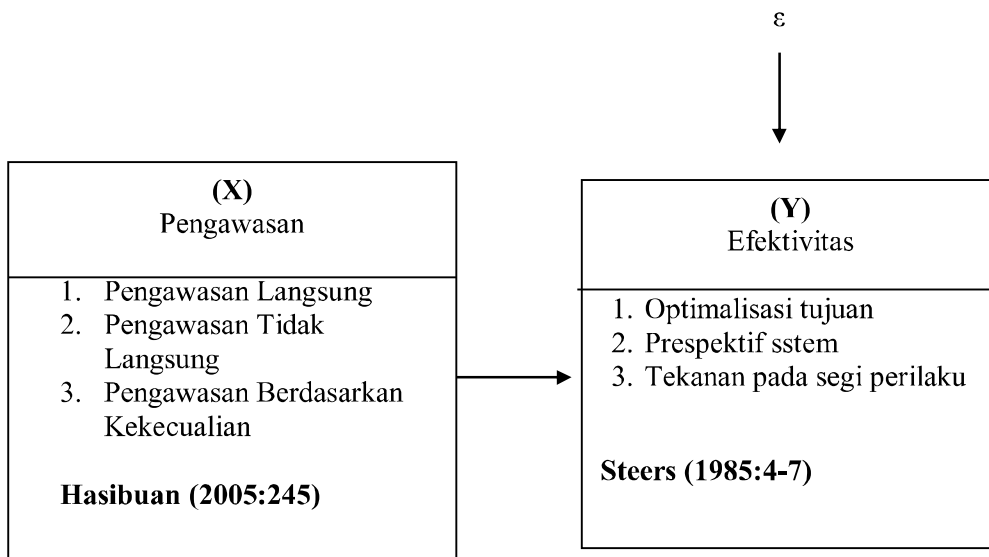
Untuk mengukur efektivitas merupakan “Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas” (Gibson, 1996:27). Pendapat senada disampaikan pula menurut Stoner dalam Sindoro (1996:6) bahwa: “efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai melakukan yang tepat”. Selanjutnya Kast dalam Sugiyono (2003:23) adalah “Efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai”. Pengertian para ahli tersebut menunjukkan bahwa konsep efektivitas menggambarkan satu ketaatan pendekatan tujuan, teori sistem atau *multi constituency*, dengan perkataan lain merupakan rekomendasi untuk memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi”. Menurut Steers (1985: 4-5) dengan cara memperhatikan tiga buah konsep yang saling berhubungan yang disebut sebagai ancangan berdimensi ganda dalam studi

evaluasi efektivitas organisasi. Adapun dimensi-dimensi tersebut terdiri atas:

1. Optimasi Tujuan: dimana efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai dan optimal.
2. Perspektif Sistem: tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat mempersembahkan masukan-masukan baru demi penentuan tujuan berikutnya.
3. Tekanan Perhatian Terhadap Perilaku Manusia: yakni meliputi tekanan atas perilaku pekerja terhadap keberhasilan organisasi untuk jangka panjang, yaitu dengan mengintegrasikan tingkat mikro dan makro dari analisis, dan menganalisis bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan lewat tingkah laku para anggota organisasi.

Model kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Model Hubungan Antara Variabel Penelitian



ε = Faktor lain yang tidak diteliti

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi (*Explanatory Research*) dimana data informasi dikumpulkan dari populasi, hasilnya dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Metode ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, sebagaimana dikemukakan oleh Singarimbun (1995:21) yaitu bahwa "Apabila peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka dinamakan penelitian penjelasan (*explanatory research*)".

5. Hasil Penelitian dan Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengawasan Oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan, akan dihitung dengan menggunakan rumus statistik yaitu Koefisien Determinasi. Sebelum melakukan perhitungan Koefisien Determinasi, akan terlebih dahulu dihitung korelasi atau hubungan diantara dua variabel tersebut dengan menggunakan rumus Koefisien Korelasi *Rank Spearman* dengan dibantu oleh software SPSS (*Statistical Product Service Solution*) Versi 17 dengan hasil sebagai berikut.

a. Uji Koefisien Rank Spearman

Berdasarkan hasil perhitungan menurut Rank Spearman melalui SPSS V. 17 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

			Pengawasan Oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Efektivitas Program sanitasi lingkungan
Spearman's rho	Pengawasan Oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Correlation Coefficient	1.000	.744
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	144	144
	Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan	Correlation Coefficient	.744**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	144	144

Sumber: Pengolahan Data SPSS V.17

Dari tabel di atas terlihat, bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Pengawasan Oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Variabel Efektivitas Penyediaan air minum sebesar 0,744 Hal ini memperlihatkan korelasi di antara dua variabel tersebut adalah kuat dan searah,

artinya Pengawasan Oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dilaksanakan dengan baik dalam mencapai Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan.

b. Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan perhitungan korelasi atau hubungan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan besarnya pengaruh dengan menghitung koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

$$KD = rs^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,744)^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,5535 \text{ atau } 55,35\%$$

Ini menunjukkan, bahwa pengaruh Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman hanya memberikan variasi sebesar 55,35%

$H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh Pengawasan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur.

$H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh Pengawasan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur.

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan

$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,744 \sqrt{\frac{144-2}{1-(0,744)^2}}$$

$$t = 13,268$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, di mana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,976 Ini menunjukkan,

terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur, hal tersebut memperlihatkan ada sebesar 44,65 % faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur yang tidak diteliti.

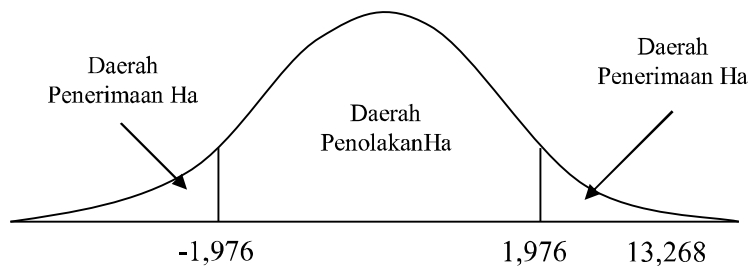
c. Pengujian Hipotesis Statistik

Langkah terakhir adalah melakukan pengujian hipotesis atau dugaan sementara dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa nilai t_{hitung} yaitu sebesar 13,268 lebih besar daripada nilai t_{tabel} , yaitu sebesar 1,976 dengan dapat digambarkan dalam kurva distribusi t sebagai berikut:

Gambar 5.1
Distribusi Normal t



Berdasarkan gambar di atas terlihat, bahwa nilai r_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_a , artinya bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima. Kesimpulannya, bahwa terdapat pengaruh Pengawasan Oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur.

6. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam hal penyediaan air bersih melalui program Sanitasi Lingkungan yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat Di Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan syarat-syarat pengawasan lum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Air Minum.
2. Besarnya Pengaruh pengawasan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman cukup signifikan sebesar 55,65 %, dan berdasarkan tabel koefisien pengaruh termasuk pada kriteria sedang , sehingga berpengaruh terhadap efektivitas program sanitasi lingkungan di Kabupaten Cianjur. Sementara faktor lain yang mempengaruhinya dan tidak diteliti sebesar 44,65%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

7. Saran-saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dikemukakan saran- saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai efektivitas program sanitasi lingkungan tidak hanya ditentukan oleh dimensi-dimensi variabel pengawasan, sehingga disarankan

untuk dilakukan penelitian lanjutan metode dan pendekatan lain serta variabel-variabel pengaruh lain yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan.

2. Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman disarankan selain dilakukan pengawasan langsung maupun melalui penilaian pelaporan pengelolaan, maka upaya koordinasi dan pembinaan dari dinas kepada kelompok swadaya masyarakat harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan serta peningkatan keahlian bagi petugas pelaksana dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis, sehingga program dapat dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, Arifin, 1979 *Kerangka Pokok-pokok Management Umum*, PT Ihtiar Baru, Van Hoeven: Jakarta
1. Dunn, William. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (terjemahan Samodra Wibawa, Asitadini, Heruanto, Erwan, Purwanto.) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
 2. Gibson et al, 1997. Organisasi Perilaku Struktur Proses. Jakarta: Binarupa Aksara
 3. Guilford, James P. 1994. *Fundamental Statistics in psychology and Education*. New York: Mc Graw Hill Book Company
 4. Handyaningrat, Soewarno, 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
 5. Hasibuan, Malayu S.P., 2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
 6. 2007. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

7. Siagian, Sondang, 1995. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Bandung: Alumni.
8. Steers, Richard, 1985, Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga
9. Sujanto, 1996. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
13.
10. Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : PN Citra Utama.
11. Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Penyediaan Air Minum
12. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air